

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PENGELUARAN**

2013-2017



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PENGELUARAN**

2013-2017



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017

IBSN :
Nomor Publikasi : 3202.18.19
Katalog : 9302023.3202

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman: ix + 85 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Dicetak oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat statistik

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SUKABUMI
MENURUT PENGELUARAN 2013 - 2017**

Penanggung Jawab Umum :
Dody Gunawan Yusuf, S.Si

Penanggung Jawab Teknis :
Ir. Yeni Mulyaningsih.

Editor:
Dede Wardana

Penulis dan Pengolahan Data :
Ir. Yeni Mulyaningsih

Desain/Lay out :
Heryanah, SIP, ME

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal ini Kabupaten Sukabumi. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sukabumi, September 2018

**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sukabumi ,**

Dody Gunawan Yusuf, S.Si

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	7
BAB II. METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT)	15
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT)	18
2.3. Engeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	20
2.4. Mentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	24
2.5. Perubahan Inventori (PI)	27
2.6. Ekspor Impor	30
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013-2017	33
3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	35
3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	45

Halaman

3.2.1	Konsumsi Akhir Rumahtangga	45
3.2.2	Konsumsi Akhir LNPRT	50
3.2.3	Konsumsi Akhir Pemerintah	51
3.2.4	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	54
3.2.5	Perkembangan Perubahan Inventori	55
3.2.6	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	57
3.2.7	Perkembangan Impor Barang dan Jasa.....	59
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN		60
KABUPATEN SUKABUMI		
4.1.	PDRB (Nominal)	62
4.2.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	63
BAB V PENUTUP		68
LAMPIRAN		70
DAFTAR PUSTAKA		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2017	36
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2017	38
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi Tahun 2013—2017	40
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2011 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi Tahun 2013—2017	43
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013 – 2017	44
Tabel 6.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013—2017	47
Tabel 7.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013—2017	49
Tabel 8.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sukabumi , Tahun 2013—2017	50
Tabel 9.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013—2017	51
Tabel 10.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013 – 2017	53
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Sukabumi , Tahun 2013—2017	56
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013—2017	57

Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013 – 2017	59
Tabel 14.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013—2017	63
Tabel 15.	Incremental Capital Value Added Ratio, Kabupaten Sukabumi, Tahun 2013 –2017	65

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Judul Grafik	Hal
Grafik 1	PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017	37
Grafik 2	PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017	39
Grafik 3	Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013-2017	39
Grafik 4	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017	41
Grafik 5	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017	43

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Nomor Tabel Lampiran	Judul Tabel Lampiran	Hal
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 – 2017	72
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013-2017	73
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 – 2017	74
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 – 2017	75
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 – 2017	76
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017	77
Tabel 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017	78
Tabel 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 – 2017	79
Tabel 9	Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 – 2017	80
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 – 2017	81

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten Sukabumi menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan

dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

- f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
 - Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau

jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPR
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

2.1. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS

- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i **Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii **Konsep dan definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;

3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi

untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan

pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Sukabumi mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P Kabupaten Sukabumi mencakup:

- a. PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi ;
- b. PK-P Kabupaten Sukabumi yang bersangkutan;
- c. PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P Kabupaten Sukabumi

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P Kabupaten Sukabumi tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-P Kabupaten Sukabumi Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku =

**Output - Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind*
purchased market production + Output Bank Indonesia**

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*)

menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS

- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate*

PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHE}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam

bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan

- dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
 - h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$
$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI atas dasar harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB}}$$
$$\text{PI atas dasar harga Berlaku} = \text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6. EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang

memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/Kabupaten Sukabumi
- b. Impor dari luar provinsi/Kabupaten Sukabumi .

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Sukabumi didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten Sukabumi diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan

pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SUKABUMI MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2013 -2017

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Pengeluaran Kabupaten Sukabumi atas dasar harga (atas dasar harga) Berlaku di tahun 2017 meningkat sebesar 10,15 %, yakni dari 51,13 triliun Rupiah (2010=100) menjadi 55,28 triliun Rupiah (2010=100). Jika dinilai atas dasar harga (atas dasar harga) Konstan 2010, maka peningkatan ini jauh lebih besar, yakni dari 39,34 triliun Rupiah (2010=100) menjadi 41,36 triliun Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 5,14 %.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah kondisi ini menjadi berbeda dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi yang fluktuatif dengan kecenderungan mengalami pertumbuhan positif, perekonomian Kabupaten Sukabumi periode 2013 - 2017 dapat tetap tumbuh di atas 4,9 %, yakni sebesar 5,51 %; 5,98 %; 4,91 %; 5,56 %; dan 5,14 %. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Pendidikan dan Kesehatan yang selalu tumbuh di atas 5% setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari 60 % total PDRB.

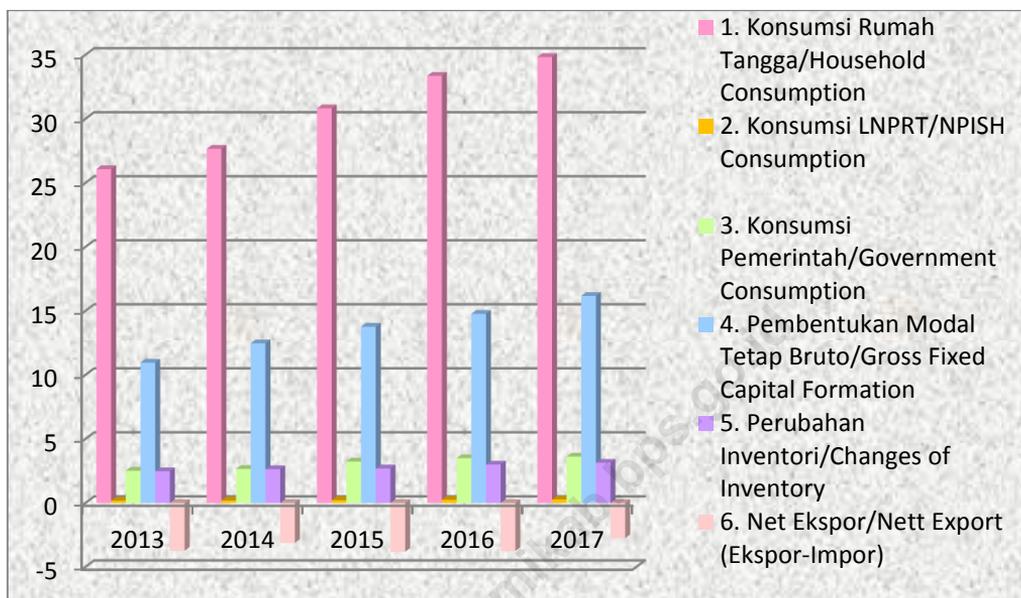
Pada periode tahun 2013 - 2017 PDRB Kabupaten Sukabumi atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 38,47 triliun Rupiah (2013); 42,51 triliun Rupiah (2014); 46,94 triliun Rupiah (2015); 51,13 triliun Rupiah (2016); dan 55,28 triliun Rupiah (2017). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Sukabumi pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017

(Milyar Rp)

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/Household Consumption	26.070,35	27.657,34	30.815,49	33.361,35	34.831,49
2. Konsumsi LNPRT/NPISH Consumption	177,97	194,29	225,53	248,06	267,63
3. Konsumsi Pemerintah/Government Consumption	2.516,42	2.658,56	3.242,36	3.503,36	3.619,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/Gross Fixed Capital Formation	10.964,35	12.473,14	13.774,55	14.773,20	16.173,16
5. Perubahan Inventori/Changes of Inventory	2.478,74	2.637,46	2.692,11	2.998,80	3.140,87
6. Net Ekspor/Nett Export (Ekspor-Impor)	-3.737,49	-3.114,38	-3.811,23	-3.751,87	-2.749,69
PDRB / GRDP	38.470,33	42.506,40	46.938,81	51.132,90	55.283,40

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017 (Trilyun Rp)



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Sukabumi pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini:

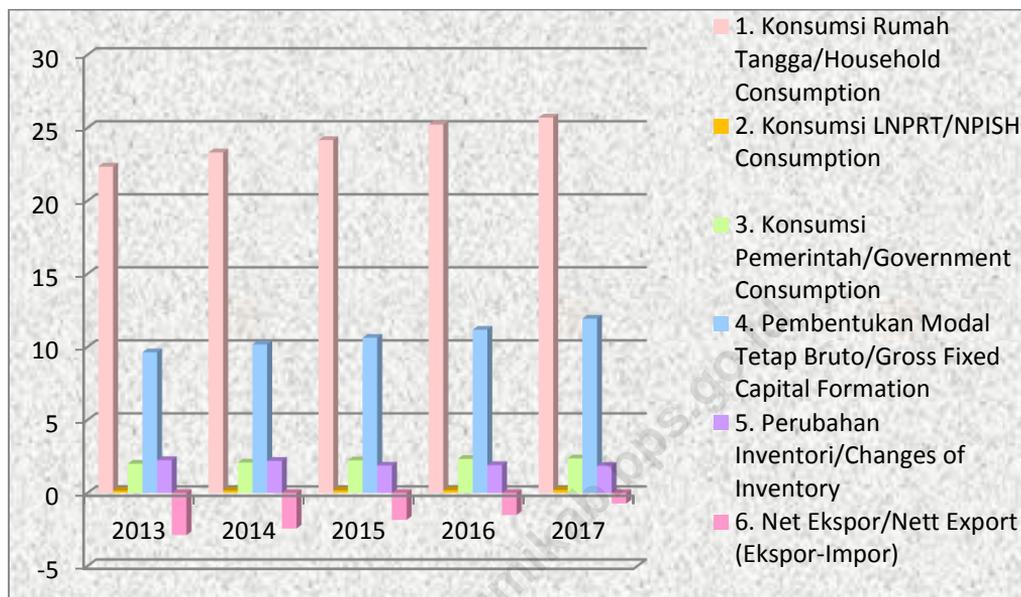
Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

(Milyar Rp)

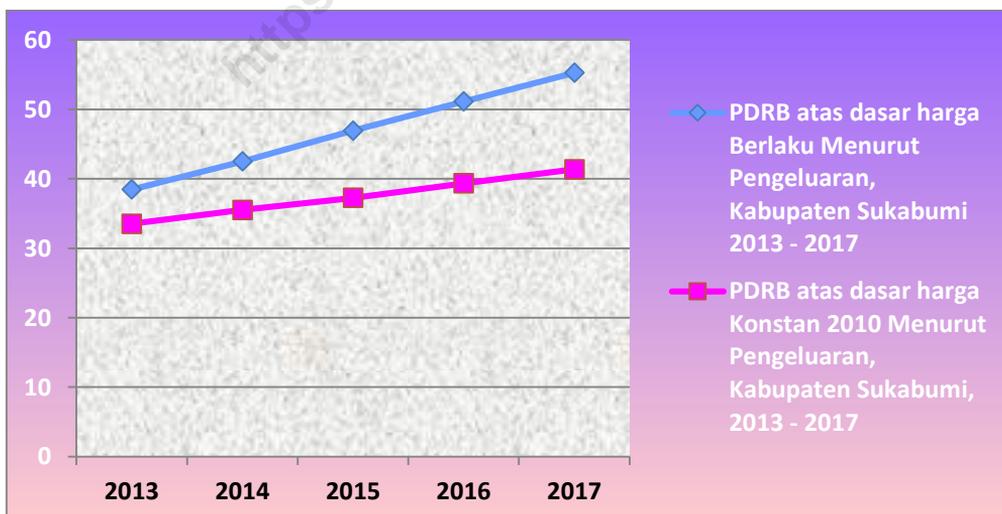
Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	22.346,78	23.315,54	24.171,07	25.227,02	25.709,26
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	155,92	168,71	182,12	191,64	200,45
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	2.013,03	2.088,30	2.240,03	2.339,48	2.366,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	9.633,86	10.175,22	10.629,43	11.176,83	11.945,26
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	2.250,38	2.202,68	1.880,88	1.908,32	1.858,51
6. Net Ekspor/ <i>Nett Export</i> (Ekspor-Impor)	-2.883,16	-2.429,02	-1.838,27	-1.504,84	-718,07
PDRB / GRDP	33.516,82	35.521,43	37.265,25	39.338,46	41.362,08

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Sukabumi meningkat, yakni sebesar 33,52 triliun Rupiah (2013); 35,52 triliun Rupiah (2014); 37,27 triliun Rupiah (2015); 39,34 triliun Rupiah (2016); dan 41,36 triliun Rupiah (2017). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi bersifat fluktuatif, yakni dari 5,51 persen pada tahun 2013 menjadi 5,14 persen pada tahun 2017.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017 (Trilyun)



Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013-2017



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat

dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure</i> item	Persen (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	67.77	65.07	65.65	65.24	63.01
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH</i> <i>Consumption</i>	0.46	0.46	0.48	0.49	0.48
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	6.54	6.25	6.91	6.85	6.55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital</i> <i>Formation</i>	28.50	29.34	29.35	28.89	29.25
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	6.44	6.20	5.74	5.86	5.68
6. Net Ekspor/ <i>Nett Export</i> (Ekspor-Impor)	-9,72	-7,33	-8,12	-7,34	-4,97
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

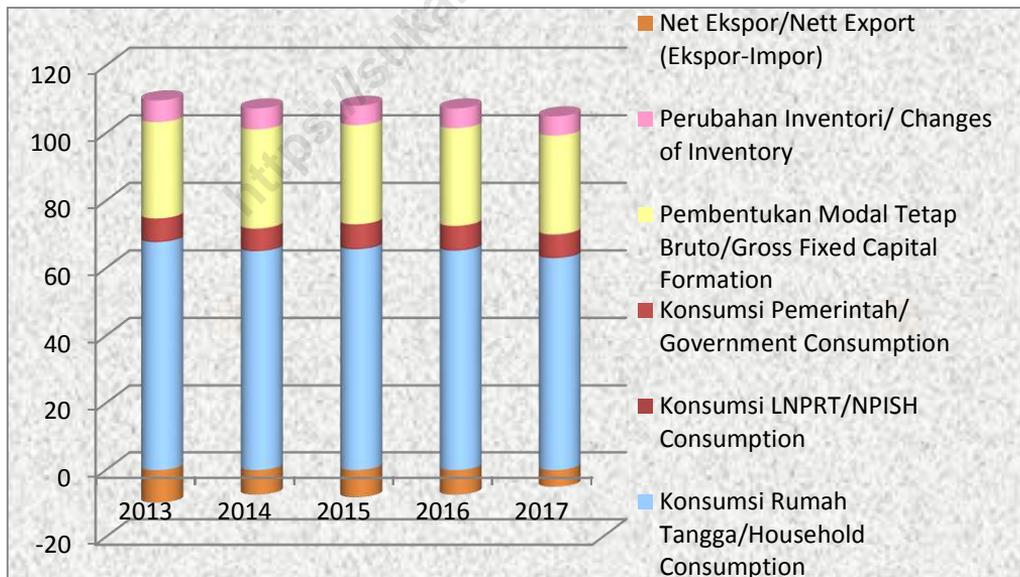
Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Sukabumi, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan

modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni berkisar pada angka 28 persen sampai dengan 29 persen.

Kabupaten Sukabumi memiliki industri dalam skala besar yang banyak, maka ketergantungan terhadap barang import dari luar kabupaten juga sangat tinggi. Bila dilihat dari angka nya maka Kabupaten Sukabumi masih termasuk dalam kabupaten dengan kategori net import, artinya import nya selalu lebih besar dari eksport nya.

Dominasi hasil perekonomian primer (terutama pertanian) dalam hal jumlah, cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal dan di ekssport ke wilayah jabar, sementara barang hasil industri masih sebagian besar import dari kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 6,25 - 6,91 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak besar dan tidak begitu dominan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa produktifitas penduduk Kabupaten Sukabumi sebagian

besar masih sekedar cukup untuk konsumsi rumah tangga. Sementara untuk konsumsi lainnya masih bergantung barang produksi dari kabupaten lainnya. Sehingga selisih perdagangan / ekspor dan impor di Kabupaten Sukabumi selalu dalam kondisi “defisit”. walaupun ada Perusahaan industri besar yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, tetapi sebagian besar bahan bakunya masih mengandalkan import dari luar, disini hanya jasa pembuatan menjadi barang jadi , sehingga semakin memperjelas kondisi “defisit” tersebut.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami kecenderungan terus meningkat, hanya saja dominasi dari faktor produksi primer (pertanian dan pertambangan) membuat hasil produktifitas penduduk tersebut hanya padat tenaga dan potensi pekerja belum kepada padat hasil baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi distribusinya.

Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami perlambatan, yakni sebesar 5,51 persen (2013); 5,98 persen (2014); 4,91 persen (2015); 5,56 persen (2016); dan 5,14 persen (2017). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

(%)

Komponen Pengeluaran/Expenditure item	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	3,11	4,34	3,67	4,37	1,91
2. Konsumsi LNPRT/NPISH Consumption	2,09	8,20	7,95	5,22	4,60
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1,02	3,74	7,27	4,44	1,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	0,57	5,62	4,46	5,15	6,88
5. Perubahan Inventori ¹⁾ / <i>Changes of Inventory</i>					
6. Net Ekspor ¹⁾ / <i>Nett Export (Ekspor-Impor)</i>					
PDRB / GRDP	5,51	5,98	4,91	5,56	5,14

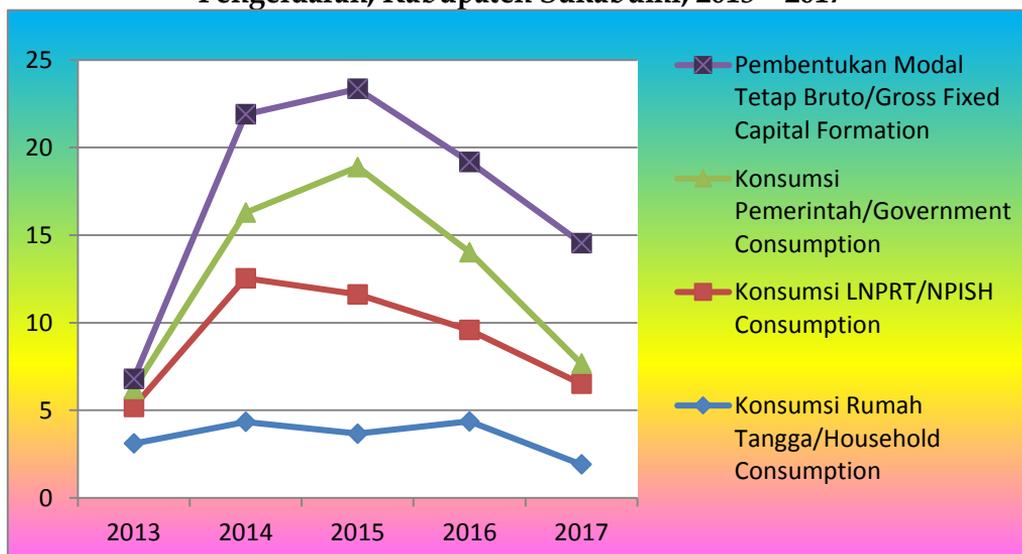
^R Data diperbaiki

* Data Sementara

** Data Sangat sementara

¹⁾ Data tidak ditampilkan

Grafik 5. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017



Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 - 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	2013	2014	2015 ^R	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	116,66	118,62	127,49	132,24	135,48
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	114,14	115,16	123,84	129,44	133,51
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	125,01	127,31	144,75	149,75	152,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	113,81	122,58	129,59	132,18	135,39
5. Perubahan Inventori ¹⁾ / <i>Changes of Inventory</i>					
6. Net Ekspor ¹⁾ / <i>Nett Export (Ekspor-Impor)</i>					
PDRB / <i>GRDP</i>	114,78	119,66	125,96	129,98	133,66

^R Data diperbaiki

^{*} Data Sementara

^{**} Data Sangat sementara

¹⁾ Data tidak ditampilkan

⁶ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Sukabumi untuk periode 2013 - 2017.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Sukabumi ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Sukabumi maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok

makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 - 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2013 - 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB meningkat/menurun/fluktuatif, yaitu 67,77 persen (2013); 65,07 persen (2014); 65,65 persen (2015); 65,24 persen (2016); dan 63,01 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 67,77 persen dan terendah pada tahun 2017 sebesar 63,01 persen. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 terjadi karena produksi tanaman pangan yang menjadi persentase terbesar produktifitas penduduk mengalami peningkatan sehingga sebagian hasil produksi yang menjadi "surplus" usaha kategori pertanian dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Atau di sisi lain bahwa kategori pertanian yang menjadi primadona produktifitas penduduk sudah menemukan pola produksi terbaiknya. Disamping karena kondisi iklim yang baik juga karena pengaturan / tata kelola air yang semakin baik kondisi ini juga dimungkinkan terjadi karena adanya efektifitas peran para penyuluh lapangan pertanian dalam menumbuhkembangkan potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi.

Pada masa percepatan pertumbuhan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut

terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Sukabumi, 2013–2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	26.070,35	27.657,34	30.815,49	33.361,35	34.831,49
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	22.346,78	23.315,54	24.171,07	25.227,02	25.709,26
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	67,77	65,07	65,65	65,24	63,01
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	39.657,894	41.834,139	46.731,200	50.376,835	52.406,465
b. ADHK 2010	33.993,651	35.266,784	36.655,040	38.093,699	38.681,430
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	10.824,68	11.418,68	12.659,28	13.646,87	14.196,66
b. ADHK 2010	9.278,62	9.626,12	9.929,69	10.319,42	10.478,62
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi RT	3,11	4,34	3,67	4,37	1,91
b. Per-RT	2,46	3,75	3,94	3,92	1,54
b. Perkapita	2,46	3,75	3,15	3,92	1,54
Jumlah RT (<i>unit</i>)	657.381	661.119	659.420	662.236	664.641
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	2.408,42	2.422,11	2.434,22	2.444,62	2.453,50

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Secara rata-rata, konsumsi per rumahtangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan/penurunan/fluktuasi, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013, setiap rumahtangga di Kabupaten Sukabumi menghabiskan dana sekitar 10.825 ribu Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat/menurun 11.419 ribu Rupiah (2014); 12.659 ribu Rupiah

(2015); 13.647 ribu Rupiah (2016); dan 14.197 ribu Rupiah (2017). Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010) rata-rata konsumsi per rumahtangga tumbuh pada kisaran 1,5 s.d. 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 3,94 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 1,5 s.d 3,92 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumahtangga Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Kelompok Konsumsi	Persen (%)				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	45,52	46,75	46,96	48,24	47,06
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,99	7,64	7,65	7,44	7,60
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,19	13,19	13,52	13,24	13,60
d. Kesehatan & Pendidikan	5,05	5,03	4,86	4,74	4,88
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,87	21,83	21,80	21,19	21,61
f. Hotel & Restoran	1,08	1,08	1,01	1,04	1,03
g. Lainnya	4,31	4,47	4,20	4,11	4,22
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada tahun 2013 pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 3,11 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar 4,34 persen (2014); 3,67 persen (2015); 4,37 persen (2016); dan 1,91 persen (2017). Sementara itu pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 2,46 persen (2013); 3,75 persen (2014); 3,015 persen (2015); 3,92 persen (2016); dan 1,54 persen (2017). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 0,36 - 0,64 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 8. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Persen (%)

Kelompok Konsumsi	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,76	3,31	8,16	6,22	1,66
b. Pakaian dan Alas Kaki	0,72	-0,64	4,65	1,05	1,98
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,64	1,89	8,22	1,41	5,41
d. Kesehatan & Pendidikan	4,69	0,01	6,03	2,83	3,84
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,84	-1,19	8,29	1,23	3,31
f. Hotel & Restoran	1,38	4,44	1,61	0,90	2,34
g. Lainnya	2,35	2,44	2,54	2,32	0,88

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 9. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	177,97	194,29	225,53	248,06	267,63
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	155,92	168,71	182,12	191,64	200,45
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,46	0,46	0,48	0,49	0,48
Pertumbuhan (ADHK 2010) (%)	2,09	8,20	7,95	5,22	4,60

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami berfluktuasi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2013 konsumsi LNPRT sebesar 177,97 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 194,29 miliar rupiah (2014); 225,53 miliar rupiah (2015); 248,06 miliar rupiah (2016) dan 267,63 miliar rupiah (2017). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2013 juga berturut-turut adalah 2,09 persen (2013), 8,20 persen (2014), 7,95 persen (2015), 5,22 persen (2016) dan 4,6 persen (2017). Pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2015 karena adanya Pilkada Kabupaten Sukabumi dan PILEG 2014.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah :

- a. *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.
- b. *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).
- c. *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri :

- a. *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
- b. *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan/penurunan/fluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2013 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 2.516,42 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya sebesar 2.658,56 miliar rupiah (2014), 3.242,36 miliar rupiah (2015), 3.503,36 miliar rupiah (2016) dan 3.619,94 miliar rupiah (2017). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan/penurunan/fluktuasi pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi fluktuasi pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas walaupun dengan range pertumbuhan yang tidak terlalu lebar.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.516,42	2.658,56	3.242,36	3.503,36	3.619,94
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.013,03	2.088,30	2.240,03	2.339,48	2.366,67
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,54	6,25	6,91	6,85	6,55
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	1.044,85	1.097,62	1.331,99	1.433,09	1.475,42
b. ADHK 2010	835,83	862,18	920,22	956,99	964,61
<u>Pertumbuhan[1] (%)</u>					
a. Total konsumsi pemerintah	1,02	3,74	7,27	4,44	1,16
b. Konsumsi perkapita	0,38	3,15	6,73	4,00	0,80
Jumlah penduduk (000 org)	2.408	2.422	2.434	2.445	2.453

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

[2] Tidak termasuk polisi dan militer

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami fluktuasi dengan range yang sangat sempit berkisar 6 persen berikut ini rincian per tahunnya, dari 6,54 persen (tahun 2013) hingga mencapai 6,55 persen (tahun 2017). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,25 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 sebesar 6,85 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2013 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1.044,85 ribu rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1.097,62 ribu rupiah (2014); 1.331,99 ribu rupiah (2015); 1.433,09 ribu rupiah (2016) dan mencapai 1.475,42 ribu rupiah pada tahun 2017.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 835,83 ribu rupiah (2013); 862,18 ribu rupiah (2014); 920,22 ribu rupiah (2015); 956,99 ribu rupiah (2016) dan 964,61 ribu rupiah (2017). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,02 persen (2013) dan menjadi 3,74 persen (2014). Kemudian pada tahun berikutnya

pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu 7,27 persen (2015); 4,44 persen (2016) dan 1,16 persen (2017).

Laju pertumbuhan konsumsi perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Sebesar 0,38 persen pada tahun 2013 dan menjadi 3,15 persen (2014), Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi perkapita yaitu 6,73 persen (2015); 4,00 persen (2016) dan 0,80 persen (2017).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 berfluktuasi dari 0,57 persen (2013) menjadi 6,88 persen

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

(2017), sementara di tahun lainnya masing-masing 5,62 persen (2014); 4,46 persen (2015) dan 5,15 persen (2016). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh dengan dimulainya pembangunan Jalan di berbagai desa dengan dana ADD, jalan-jalan menuju daerah wisata Geopark Ciletuh, pembangunan yang terus berkembang dalam rangka peningkatan sektor wisata, sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Tabel. 11. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	10.964,35	12.473,14	13.774,55	14.773,20	16.173,16
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.633,86	10.175,22	10.629,43	11.176,83	11.945,26
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	28,50	29,34	29,35	28,89	29,25
<u>Struktur PMTB [1]</u>					
a. Bangunan (Miliar Rp)	9.292,67	10.414,23	11.548,56	12.325,41	13.583,97
(%)	84,75	83,49	83,84	83,43	83,99
b. Non Bangunan (Miliar Rp)	1.671,68	2.058,90	2.225,99	2.447,80	2.589,18
(%)	15,25	16,51	16,16	16,57	16,01
Total PMTB (Miliar Rp)	10.964,35	12.473,14	13.774,55	14.773,20	16.173,16
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<u>Pertumbuhan[2] (%)</u>					
a. Bangunan	6,93	4,16	5,05	5,48	7,58
b. Non Bangunan	(23,77)	13,45	1,57	3,48	3,20
Total PMTB	0,57	5,62	4,46	5,15	6,88

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi

(kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.478,74	2.637,46	2.692,11	2.998,80	3.140,87
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.250,38	2.202,68	1.880,88	1.908,32	1.858,51
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,44	6,20	5,74	5,86	5,68

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 2.478,74 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 2.637,46 miliar rupiah dan 2.692,11 miliar rupiah. Pada tahun 2016 perubahan inventori mencapai 2.998,80 miliar rupiah, tahun 2017 kembali mencapai 3.140,87 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Sukabumi mengalami kecenderungan penurunan tipis. Pada tahun 2013, proporsi perubahan inventori adalah 6,44 persen, selanjutnya 6,20 persen (2014), 5,74 persen (2015), 5,86 persen (2016) dan 5,68 persen (2017). Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh mulai maraknya perdagangan dalam sistem perdagangan online dan biasanya berasal dari luar daerah (ekspor), hal ini menyebabkan pedagang konvensional mengalami penumpukan stock dari tahun sebelumnya. Hal lainnya adalah perkiraan kemarau panjang yang akan terjadi di tahun 2015 tidak terjadi sehingga barang produksi pertanian yang di simpan petani menjadi menumpuk dan tidak terjual.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Sukabumi, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor barang dan jasa Kabupaten Sukabumi, 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	(3737,49)	(3114,38)	(3811,23)	(3751,87)	(2749,69)
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	(2883,16)	(2429,02)	(1838,27)	(1504,84)	(718,07)
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	(9,72)	(7,33)	(8,12)	(7,34)	(4,97)

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai net ekspor barang dan jasa menunjukkan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -3.737,49 miliar rupiah meningkat menjadi sebesar -3.114,38 miliar rupiah pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2015-2017 nilai net ekspor barang dan jasa sebesar -3.811,23 miliar rupiah; -3.751,87 miliar rupiah dan -2.749,69 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai net ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai net ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2013 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar -2.883,16 miliar rupiah (2013); -2.429,02 miliar rupiah (2014); -1.838,27 miliar rupiah (2015); -1.504,84 miliar rupiah (2016) dan -718,07 miliar rupiah (2017). Sementara itu, pada periode 2013 s.d 2017, proporsi dalam PDRB justru cenderung meningkat dari -9,72 persen pada tahun 2013 menjadi 4,97 persen di tahun 2017.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Sukabumi. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Sukabumi di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kabupaten Sukabumi terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kabupaten Sukabumi lain dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri.

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN SUKABUMI,
2013 - 2017**

<https://sukabumikab.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Sukabumi di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	38.470,33	42.506,40	46.938,81	51.132,90	55.283,40
- ADHK 2010	33.516,82	35.521,43	37.265,25	39.338,46	41.362,08
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	15.973,28	17.549,31	19.282,89	20.916,53	22.532,48
- ADHK 2010	13.916,53	14.665,47	15.308,90	16.091,88	16.858,41
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	4,84	5,38	4,39	5,11	4,76
Jumlah penduduk (000 org)	2.408,42	2.422,11	2.434,22	2.444,62	2.453,50
Pertumbuhan (%)	0,64	0,57	0,50	0,43	0,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.2 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Untuk publikasi ini akan didekati dengan ICVAR atau Incremental Capital Value Added Ratio, hal ini disebabkan karena keterbatasan data sampai dengan tingkat wilayah kabupaten.

**Tabel 15. Incremental Capital Output Ratio (ICOR),
Kabupaten Sukabumi, 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (<i>miliar rupiah</i>)	33.516,82	35.521,43	37.265,25	39.338,46	41.362,08
Perubahan (<i>miliar rupiah</i>)	1.749,12	2.004,61	1.743,82	2.073,20	2.023,62
PMTB (ADHK 2010) (<i>miliar Rp</i>)	9.633,86	10.175,22	10.629,43	11.176,83	11.945,26
ICOR	5,51	5,08	6,10	5,39	5,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

<https://sukabumikab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Sukabumi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut

pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Sukabumi terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 - 2017

(Milyar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	26.070,35	27.657,34	30.815,49	33.361,35	34.831,48
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11.866,28	12.930,43	14.470,81	16.094,22	16.391,72
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.081,77	2.113,96	2.358,79	2.482,06	2.646,07
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.439,76	3.647,59	4.166,44	4.417,28	4.736,59
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.315,86	1.392,18	1.497,36	1.580,9	1.701,15
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	5.961,45	6.037,99	6.716,56	7.069,44	7.526,89
1.f. Hotel dan Restoran	282,52	299,86	311,57	345,37	358,19
1.g. Lainnya	1.122,7	1.235,33	1.293,95	1.372,08	1.470,86
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	177,97	194,29	225,53	248,06	267,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.516,42	2.658,56	3.242,36	3.503,36	3.619,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.964,34	12.473,14	13.774,55	14.773,2	16.173,16
4.a. Bangunan	9.292,67	10.414,23	11.548,56	12.325,40	13.583,97
4.b. Non Bangunan	1.671,68	2.058,90	2.225,99	2.447,8	2.589,18
5. Perubahan Inventori	2.478,74	2.637,46	2.692,11	2.998,80	3.140,87
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-3.737,49	-3.114,38	-3.811,23	-3.751,87	-2.749,68
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	38.470,32	42.506,40	46.938,81	51.132,9	55.283,40

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013-2017

(Milyar Rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	22.346,78	23.315,54	24.171,07	25.227,02	25.709,26
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9.551,21	10.073,83	10.423,22	10.913,55	10.933,67
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.979,20	2.022,67	2.156,64	2.245,77	2.347,76
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.057,50	3.182,02	3.358,53	3.511,14	3.571,75
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.156,55	1.223,47	1.241,12	1.274,28	1.320,45
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	5.351,43	5.485,54	5.634,67	5.858,74	6.038,02
1.f. Hotel dan Restoran	268,33	272,67	278,83	306,31	310,43
1.g. Lainnya	982,56	1.055,34	1.078,06	1.117,22	1.187,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	155,92	168,71	182,12	191,64	200,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.013,03	2.088,30	2.240,03	2.339,48	2.366,67
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.633,86	10.175,22	10.629,43	11.176,83	11.945,26
4.a. Bangunan	8.122,24	8.460,26	8.887,50	9.374,34	10.085,16
4.b. Non Bangunan	1.511,62	1.714,96	1.741,93	1.802,49	1.860,10
5. Perubahan Inventori	2.250,78	2.202,68	1.880,88	1.908,32	1.858,51
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-2.883,16	-2.429,02	-1.838,27	-1.504,84	-718,07
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	33.516,82	35.521,43	37.265,25	39.338,46	41.362,08

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	67,77	65,07	65,65	65,24	63,01
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	30,85	30,42	30,83	31,48	29,65
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,41	4,97	5,03	4,85	4,79
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,94	8,58	8,88	8,64	8,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,42	3,28	3,19	3,09	3,08
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	15,50	14,20	14,31	13,83	13,62
1.f. Hotel dan Restoran	0,73	0,71	0,66	0,68	0,65
1.g. Lainnya	2,92	2,91	2,76	2,68	2,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,46	0,46	0,48	0,49	0,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,54	6,25	6,91	6,85	6,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,50	29,34	29,35	28,89	29,25
4.a. Bangunan	24,16	24,50	24,60	24,10	24,57
4.b. Non Bangunan	4,35	4,84	4,74	4,79	4,68
5. Perubahan Inventori	6,44	6,20	5,74	5,86	5,68
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-9,72	-7,33	-8,12	-7,34	-4,97
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	66,67	65,64	64,86	64,13	62,16
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,50	28,36	27,97	27,74	26,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,91	5,69	5,79	5,71	5,68
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,12	8,96	9,01	8,93	8,64
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,45	3,44	3,33	3,24	3,19
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	15,97	15,44	15,12	14,89	14,60
1.f. Hotel dan Restoran	0,80	0,77	0,75	0,78	0,75
1.g. Lainnya	2,93	2,97	2,89	2,84	2,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,47	0,49	0,49	0,48
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,01	5,88	6,01	5,95	5,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,74	28,65	28,52	28,41	28,88
4.a. Bangunan	24,23	23,82	23,85	23,83	24,38
4.b. Non Bangunan	4,51	4,83	4,67	4,58	4,50
5. Perubahan Inventori	6,71	6,20	5,05	4,85	4,49
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-8,60	-6,84	-4,93	-3,83	-1,74
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017.

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,20	6,09	11,42	8,26	4,41
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11,21	8,97	11,91	11,22	1,85
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8,16	1,55	11,58	5,23	6,61
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,70	6,04	14,22	6,02	7,23
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,48	5,80	7,56	5,58	7,61
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	10,12	1,28	11,24	5,25	6,47
1.f. Hotel dan Restoran	7,62	6,13	3,91	10,85	3,71
1.g. Lainnya	6,51	10,03	4,75	6,04	7,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,25	9,17	16,08	9,99	7,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,39	5,65	21,96	8,05	3,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,09	13,76	10,43	7,25	9,48
4.a. Bangunan	12,20	12,07	10,89	6,73	10,21
4.b. Non Bangunan	-22,27	23,16	8,12	9,96	5,78
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13,33	10,49	10,43	8,94	8,12

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ dan ²⁾ Data tidak ditampilkan

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,11	4,34	3,67	4,37	1,91
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,25	5,47	3,47	4,70	0,18
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	7,38	2,20	6,62	4,13	4,54
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,84	4,07	5,55	4,54	1,73
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,67	5,79	1,44	2,67	3,62
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,07	2,51	2,72	3,98	3,06.
1.f. Hotel dan Restoran	6,16	1,62	2,26	9,86	1,34
1.g. Lainnya	4,07	7,41	2,15	3,63	6,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,09	8,20	7,95	5,22	4,60
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,02	3,74	7,27	4,44	1,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,57	5,62	4,46	5,15	6,88
4.a. Bangunan	6,93	4,16	5,05	5,48	7,58
4.b. Non Bangunan	-23,77	13,45	1,57	3,48	3,20
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah ²⁾					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5,51	5,98	4,91	5,56	5,14

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ dan ²⁾ Data tidak ditampilkan

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi, 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	129,83	137,73	153,46	166,13	173,45
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	136,96	149,24	167,02	185,75	189,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	125,26	127,19	141,92	149,34	159,21
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	118,09	125,22	143,04	151,65	162,61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	121,69	128,75	138,48	146,20	157,32
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	127,69	129,33	143,87	151,43	161,22
1.f. Hotel dan Restoran	127,20	135,00	140,27	155,49	161,26
1.g. Lainnya	129,06	142,01	148,75	157,73	169,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	135,89	148,35	172,21	189,41	204,35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	133,14	140,66	171,54	185,35	191,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	135,13	153,72	169,76	182,07	199,32
4.a. Bangunan	143,57	160,90	178,43	190,43	209,87
4.b. Non Bangunan	101,83	125,41	135,59	149,10	157,71
5. Perubahan Inventori	149,62	159,20	162,50	181,01	189,59
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	114,21	95,17	116,46	114,65	84,02
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	134,51	148,62	164,12	178,78	193,30

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	111,28	116,11	120,37	125,63	128,03
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	110,24	116,27	120,30	125,96	126,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	119,08	121,70	129,76	135,12	141,26
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	104,96	109,24	115,30	120,54	122,62
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	106,96	113,15	114,78	117,85	122,12
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	114,63	117,50	120,69	125,49	129,33
1.f. Hotel dan Restoran	120,80	122,76	125,53	137,91	139,76
1.g. Lainnya	112,95	121,32	123,93	128,43	136,48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	119,06	128,82	139,06	146,33	153,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	106,50	110,48	118,51	123,77	125,21
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	118,73	125,40	131,00	137,74	147,22
4.a. Bangunan	125,49	130,71	137,31	144,83	155,82
4.b. Non Bangunan	92,08	104,46	106,11	109,79	113,30
5. Perubahan Inventori	135,84	132,96	113,53	115,19	112,18
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	88,10	74,23	56,17	45,98	21,94
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	117,19	124,20	130,30	137,54	144,62

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	116,66	118,62	127,49	132,24	135,48
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	124,24	128,36	138,83	147,47	149,92
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	105,18	104,51	109,37	110,52	112,71
1.c. Perumahan, Perkakas, perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	112,50	114,63	124,06	125,81	132,61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	113,77	113,79	120,65	124,06	128,83
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	111,40	110,07	119,20	120,66	124,66
1.f. Hotel dan Restoran	105,29	109,97	111,74	112,75	115,39
1.g. Lainnya	114,26	117,06	120,03	122,81	123,89
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	114,14	115,16	123,84	129,44	133,51
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	125,01	127,31	144,75	149,75	152,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	113,81	122,58	129,59	132,18	135,39
4.a. Bangunan	114,41	123,10	129,94	131,48	134,69
4.b. Non Bangunan	110,59	120,06	127,79	135,80	139,20
5. Perubahan Inventori	110,15	119,74	143,13	157,14	169,00
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	129,63	128,22	207,33	249,32	382,93
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	114,78	119,66	125,96	129,98	133,66

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sukabumi 2013 - 2017

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2013	2014 ^R	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6,88	1,68	7,48	3,73	2,45
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,76	3,31	8,16	6,22	1,66
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,72	-0,64	4,65	1,05	1,98
1.c. Perumahan, Perkakas, erlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,64	1,89	8,22	1,41	5,41
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,69	0,01	6,03	2,83	3,84
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6,84	-1,19	8,29	1,23	3,31
1.f. Hotel dan Restoran	1,38	4,44	1,61	0,90	2,34
1.g. Lainnya	2,35	2,44	2,54	2,32	0,88
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,99	0,90	7,53	4,53	3,15
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,31	1,84	13,70	3,46	2,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,49	7,71	5,71	2,00	2,43
4.a. Bangunan	4,93	7,59	5,56	1,18	2,44
4.b. Non Bangunan	1,97	8,56	6,44	6,27	2,50
5. Perubahan Inventori ¹⁾					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah ²⁾					
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7,42	4,26	5,26	3,19	2,83

^R Angka Perbaikan

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

¹⁾ dan ²⁾ Data tidak ditampilkan

DAFTAR PUSTAKA

<https://sukabumikab.bps.go.id>

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

<https://sukabumikab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<https://suhartoindonesia.com/ps/ps.go.id>